



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025**



**DISUSUN OLEH:
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini menyajikan informasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan memiliki hasil yang lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan sebagai bahan informasi kinerja SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.



Praya, 31 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 199803 1 007
Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Loteng	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Loteng	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	28
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	47
3.3 Program dan Kegiatan	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	59

BAB V	PENUTUP.....	75
5.1	Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian.....	75
5.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	75
5.3	Rencana Tindak Lanjut	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Th. 2023 ...	8
Tabel 2.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Ditetapkan	15
Tabel 2.3	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target yang Ditetapkan	19
Tabel 2.4	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan.....	21
Tabel 2.5	Realisasi Belanja tahun Anggaran 2023	24
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kab Lombok Tengah.....	27
Tabel 2.7	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	32
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan	39
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan	44
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dishub Prov. NTB	46
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Tahun 2025.....	49
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	53
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjadi salah satu dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dengan memperhatikan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan *bottom-up* serta perencanaan *top-down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan strategis jangka pendek Perangkat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra. Disebutkan juga bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang disusun berdasarkan evaluasi

pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Tahun 2020-2023;
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Adapun *output* dan *outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan. Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah menangani urusan perhubungan dengan jenis pelayanan dasar bidang perhubungan yang meliputi: manajemen keselamatan lalu lintas, fasilitas perlengkapan jalan, jaringan pelayanan dan prasarana angkutan, serta pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah memiliki fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja tahunan di bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian penyusunan RKT, RKA dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan;
4. Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan dibidang Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, dan Bidang Angkutan;
6. Penyelenggaraan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi tugas-tugas bidang Perhubungan dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain baik instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan atau swasta;

8. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integritas dan sinkronisasi program-program Dinas Perhubungan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
9. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang perhubungan;
10. Pelaksanaan pembinaan manajemen terhadap tugas-tugas bawahan;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perhubungan;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah beserta kewenangannya seperti yang tertuang pada Perbup di atas. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1.1 Evaluasi Pencapaian target Kinerja Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Berikut akan disajikan rekapitulasi pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.15	PERHUBUNGAN									
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	BB	B	B	B	100	BB	BB	100
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100	161,16	100	134,37	134,37	100	100	100
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	30	30	30	100	30	30	100
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	43	43	43	100	43	100	100
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	30	45	45	100	60	60	100
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20	10	15	15	100	20	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja lebih dari 80%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	30	45	45	100	60	60	100
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	5	10	10	100	17	17	113,33
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	1	2	2	100	3	3	100
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105	55	85	85	100	93	93	88,57
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	12	24	23	95,83	37	37	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	12	24	24	100	36	36	100
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50	49	49	49	100	45	45	90
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	69	52,19	55,96	66,11	118,14	66,12	66,12	95,82
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang	65,00	20,83	9,76	44,02	451,02	44,03	44,03	67,74
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	97500	31246	14635	66034	451,02	66046	66046	67,74
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan terpeliharaan	5014	3005	4013	4005	99,80	5005	5005	99,82

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang tergarap	83,64	61,82	72,73	68,97	94,83	83,64	83,64	100
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	36	12	24	24	100	36	36	100
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	98	86,82	97	56,96	58,72	98	98	100
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	11	6	7	10	142,86	11	11	100
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	28510	13438	20622	18622	90,30	25010	25010	100
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	6	6	9	150	9	9	100
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	60	19,2	40	40	100	60	60	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	36	12	24	24	100	36	36	100
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	85	64,25	74	80,52	108,81	85	85	100
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	36	12	24	24	100	36	36	100
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	57	0	36	0	0	14	0	0
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	36	12	24	24	100	36	36	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd. tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitas Pas Kecil Angkutan Laut	100	80	40	93	232,50	100	100	100
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitas Pas Kecil Angkutan Laut	500	400	200	465	232,50	500	500	100
2.15.03.2.02.03	Penebitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atan Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penebitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atan Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36	12	24	24	100	36	36	100

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pencapaian target kinerja Renja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Tahun 2023, telah dilaksanakan 1 Urusan, 3 Program, 14 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan;
2. Dari 3 Program tersebut, terdapat 1 Program yang memenuhi target yang ditetapkan dan 2 Program lainnya telah melebihi target yang ditetapkan;
3. Dari 14 Kegiatan, terdapat 3 Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, 7 Kegiatan mencapai target sesuai yang ditetapkan, serta 4 Kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan;
4. Dari 22 Sub Kegiatan, terdapat 3 Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan, 16 Sub Kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan, dan 3 Sub Kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan;
5. Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut ini:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Ditetapkan

Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang
Tidak Memenuhi Target yang Ditetapkan**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang tergarap	72,73%	68,97%	94,83
2	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	97,00%	56,96%	58,72
3	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	36%	0	0
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 laporan	23 laporan	95,83

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
5	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang direhabilitasi dan terpeliharaan	4013 buah	4005 buah	99,80
6	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20622 buah	18622 buah	90,30

Pada Tahun Anggaran 2023 terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi target Renja yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap berhasil mencapai 68,97% dari target yang ditetapkan sebesar 72,73%, atau tercapai sebesar 94,83%. Adapun beberapa **permasalahan/kendala** yang dihadapi di lapangan dalam mencapai target ini antara lain:
 - a. untuk lokasi parkir di tepi jalan umum, terdapat lokasi parkir yang belum tergarap karena lokasinya yang dianggap kurang potensial dari segi penerimaan parkir (bersifat musiman), sehingga belum ada juru parkir yang berminat untuk ditempatkan pada lokasi tersebut;
 - b. untuk lokasi parkir khusus, kendala yang dialami adalah masih dikuasainya lokasi parkir khusus tersebut oleh pihak lain.

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa **solusi** yang sedang dan terus diupayakan yaitu:

- c. mencari juru parkir untuk ditempatkan pada lokasi parkir di tepi jalan umum yang belum dikelola;
- d. melakukan mediasi serta mendorong Pemda (melalui Bappenda) untuk segera melakukan pelelangan lokasi tempat khusus parkir agar bisa segera dikelola oleh pihak ketiga

Sedangkan secara umum, **hambatan-hambatan** yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir adalah sebagai berikut:

- e. kurangnya lahan parkir yang memadai;
- f. masih adanya parkir liar;

- g. adanya juru parkir (resmi) yang kurang mematuhi aturan;
- h. adanya lokasi-lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak lain;
- i. masih banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadinya kemacetan lalu lintas; serta
- j. terbatasnya sarana dan prasarana maupun anggaran untuk melakukan penertiban dan pengawasan parkir ke seluruh kecamatan secara berkala.

Beberapa **rekomendasi** yang perlu ditindaklanjuti untuk mengurai permasalahan parkir antara lain:

- k. peningkatan kapasitas juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;
 - l. intensifikasi kegiatan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol-PP, dll);
 - m. adanya reward dan punishment bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran;
 - n. pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum.
2. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan target berupa "Persentase Kendaraan yang Laik Jalan" sebesar 97% hanya dapat tercapai sebesar 56,96% atau mencapai 58,72%. Beberapa **permasalahan** yang dihadapi antara lain:
- o. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan kendaraan laik jalan;
 - p. Kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang belum melakukan Uji KIR;
 - q. Terdapat kecenderungan masyarakat untuk menunggu berlakunya Uji KIR secara gratis yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 (berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Beberapa **upaya** untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- r. pengusulan anggaran penertiban kendaraan yang tidak laik jalan;

- s. pengusulan anggaran diklat PPNS agar Dinas Perhubungan memiliki SDM untuk melakukan penindakan di jalan;
 - t. mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara gratis pada tahun 2024.
3. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.
- Realisasi pada target kegiatan ini yaitu berupa "Persentase Trayek Angkutan Umum yang dinormalisasi" yang ditetapkan sebesar 36% belum dapat dilaksanakan karena beberapa hal sebagai berikut:
- u. Tidak tersedia alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan normalisasi trayek;
 - v. Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
 - w. Kurang layakannya armada angkutan umum yang ada;
 - x. Banyaknya angkutan umum banyak yang beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi;
 - y. Berkembang pesatnya angkutan umum berbasis aplikasi (Grab, Gojek, dsb);
- Walaupun kegiatan normalisasi trayek angkutan umum ini belum dapat dilaksanakan, Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan pengendalian angkutan umum secara berkala berupa:
- z. penertiban ijin angkutan dan jalur lintas angkutan barang;
 - aa. penertiban kendaraan yang over dimension and over load (ODOL);
 - bb. penerbitan rekomendasi ijin trayek
4. Pada Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pembayaran listrik kantor dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hanya terbayar selama 11 bulan dari target pembayaran selama 12 bulan yang terjadi karena kurangnya anggaran. Pada tahapan perubahan APBD, kekurangan anggaran ini sudah kami usulkan untuk ditambah namun tidak dapat diakomodir karena terbatasnya Kas Daerah.

5. Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan indikator jumlah perlengkapan jalan yang direhabilitasi atau dipelihara dapat tercapai sebesar 4005 buah dari 4013 buah yang direncanakan, atau sebesar 99,80%. Hal ini terjadi karena kondisi perlengkapan jalan yang ada (dalam hal ini adalah traffic light) sudah memerlukan peremajaan atau pengadaan unit baru karena usianya yang lebih dari 15 tahun.
6. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan indikator Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor yang Disediakan dapat tercapai sebesar 18622 buah dari 20622 buah atau sebesar 90,30%. Hal ini terjadi karena pengadanan Bukti Lulus Uji disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

Tidak terpenuhinya beberapa output dan target pada beberapa indikator kegiatan di atas tentu saja berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut perlu menjadi catatan penting pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Ditetapkan

Rekapitulasi Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diuraikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Memenuhi Target yang Ditetapkan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	B	100
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	100
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dok	30 dok	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 org	43 org	100
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	45 dok	45 dok	100
7	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100%	100%	100
8	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15 dok	15 dok	100
9	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja lebih dari 80%	100%	100%	100
10	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45 dok	45 dok	100
11	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100%	100%	100
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	100
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	100
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 dok	85 dok	100
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	100%	100%	100
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 dok	24 dok	100
17	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100%	100%	100
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	49 unit	49 unit	100
19	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24 dok	24 dok	100
20	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	40%	40%	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
21	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	24 dok	24 dok	100
22	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	24 dok	24 dok	100
23	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24 dok	24 dok	100

Terpenuhinya realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan yang cukup berarti dalam pemenuhan target-target tersebut.

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Ditetapkan

Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan diuraikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Melebihi Target yang Ditetapkan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100,00%	134,37%	134,37
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	55,96	66,11	118,14
3	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang	9,76	44,02	451,02
4	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	14635	66034	451,02
5	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	7	10	142,86
6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6	9	150
7	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	74	80,52	108,81

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
8	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitas Pas Kecil Angkutan Laut	40	93	232,50
9	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitas Pas Kecil Angkutan Laut	200	465	232,50

Terlampauinya target pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kegiatan/Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, terdapat realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena:
 - cc. Terdapat pemasangan PJU Tenaga Surya yang bersumber dari Kementerian ESDM sebanyak 75 unit pada ruas jalan Batunyala, Kawo, dan Desa Tumpak;
 - dd. Terdapat pemasangan marka jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 28.300 meter.

Selain itu dari APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah terdapat penambahan sarana dan prasarana keselamatan jalan berupa:

 - ee. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 36 buah di Kecamatan Praya dan Praya Tengah;
 - ff. Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan sebanyak 4 buah di Kecamatan Praya dan Praya Tengah;
 - gg. Pengadaan dan pemasangan PJU Tenaga Listrik di Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah;
 - hh. Pengadaan dan pemasangan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 4 unit, sehingga total alat uji yang tersedia sebanyak 10 unit;
2. Pada Program Pengelolaan Pelayaran dengan target berupa Persentase Penerbitan Pas Kecil Angkutan Laut berhasil mencapai realisasi sebesar 232,5% karena adanya program dari Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Pas Kecil angkutan laut secara gratis;

3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terdapat realisasi yang melebihi target yang direncanakan, yaitu berupa pengadaan 4 alat uji kendaraan bermotor secara sekaligus yang sebelumnya direncanakan secara bertahap. Realisasi ini secara langsung berpengaruh linier terhadap peningkatan jumlah alat uji yang dipelihara yang merupakan indikator pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Tercapainya realisasi yang melebihi target yang ditetapkan menyebabkan meningkatnya pencapaian IKU Dinas Perhubungan yang merupakan indikator pada Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan terpenuhinya target pada sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan serta terdapat indikator-indikator kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan maka diharapkan hal tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan layanan kepada masyarakat dalam memenuhi tujuan dan sasaran kegiatan seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas.

Adapun untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat direalisasikan pada Renja Tahun 2023 tersebut akan dilakukan pengusulan kembali di tahun mendatang baik melalui mekanisme usulan APBD maupun APBN.

2.1.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan Pagu Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023. Rincian pagu beserta realisasi anggaran tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.203.242.931,00	3.937.721.002,00	93,68
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.354.100,00	26.252.240,00	99,61
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.618.700,00	11.611.740,00	99,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.735.400,00	14.640.500,00	99,36
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.668.855.650,00	3.466.417.960,00	94,48
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.644.526.040,00	3.442.229.710,00	94,45
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	24.329.610,00	24.188.250,00	99,42
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.671.480,00	10.575.500,00	99,10
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.671.480,00	10.575.500,00	99,10
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.901.700,00	16.800.500,00	99,40
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16.901.700,00	16.800.500,00	99,40
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.233.958,00	136.821.045,00	96,88
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.249.958,00	76.120.967,00	99,83
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.984.000,00	42.700.078,00	90,88
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.910.683,00	120.301.154,00	79,72
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.230.683,00	70.327.154,00	87,66
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.680.000,00	49.974.000,00	70,70
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.315.360,00	160.552.603,00	85,26
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	188.315.360,00	160.552.603,00	85,26
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.183.094.781,00	16.126.234.271,00	99,65

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.800.554.718,00	13.789.596.741,00	99,92
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.709.754.718,00	13.698.896.741,00	99,92
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	90.800.000,00	90.700.000,00	99,89
9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	125.890.000,00	125.427.500,00	99,63
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	125.890.000,00	125.427.500,00	99,63
10	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.652.099.223,00	1.638.846.730,00	99,20
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.389.154.223,00	1.377.214.230,00	99,14
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	112.945.000,00	111.632.500,00	98,84
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	422.675.840,00	391.428.300,00	92,61
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	422.675.840,00	391.428.300,00	92,61
12	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	97.890.000,00	97.427.500,00	99,53
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	97.890.000,00	97.427.500,00	99,53
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	83.985.000,00	83.507.500,00	99,43
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	83.985.000,00	83.507.500,00	99,43
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	70.608.230,00	67.034.584,00	94,94
14	Penerbitan Izin Usaha Angkutan laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.608.230,00	67.034.584,00	94,94
	Penebitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.608.230,00	67.034.584,00	94,94
Total		20.456.945.942,00	20.130.989.857,00	98,41

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa jumlah realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 20.130.989.857,00 dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp 20.456.930.942,00 atau mencapai 98,41% dengan realisasi fisik sebesar 99,00%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka Dinas Perhubungan tidak melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat kami uraikan pada Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi capaian Tahun-			Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	-	-	0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,35	0,35	0,26	0,25	0,24	
3	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	-	-	35,29	37,25	39,22	43,14	47,06	35,29	37,25	39,22	39,22	39,22	
4	Terlaksananya pelayanan uji berkala (persentase kendaraan laik jalan)	-	-	95	96	97	98	99	65,00	86,82	55,96	98	99	
5	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	-	-	-	20	40	60	80	-	19,2	40	60	80	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah SDM teknis di Bidang Perhubungan;
2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan di kecamatan. Permasalahan ini berkaitan dengan tidak beroperasinya sebagian besar trayek yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Lombok Tengah dan masih kurangnya pelayanan Terminal Tipe C (Terminal Mujur);
3. Rendahnya *load factor* (faktor muat) penumpang yang menggunakan angkutan umum;
4. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang masih belum sebanding dengan panjang ruas jalan kabupaten;
5. Belum optimalnya ketersediaan lahan parkir;
6. Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan yang masih cukup tinggi;
7. Tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD, sedangkan pada sisi lain tidak tersedia dana DAK bidang perhubungan sejak lima tahun terakhir.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yaitu:

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang semakin meningkat;
 - Dijadikannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Super Prioritas dan adanya event-event internasional pada Pertamina Mandalika International Street Circuit;
 - Meningkatnya rute dan volume penerbangan yang dilayani oleh Bandara Internasional Lombok;

- Besarnya intensitas penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Lombok Tengah;
 - Rencana penerapan *one gate system* pada pemberangkatan kapal cepat yang melalui dermaga Kuta;
 - Pusat aktivitas yang belum merata.
- b. Peluang yang ada antara lain:
- Adanya regulasi yang cukup memadai;
 - Adanya keterbukaan informasi publik, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - Adanya sinergisitas terkait strategi dan upaya penanganan masalah transportasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat;

Dari permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut maka dapat disusun isu-isu strategis yang penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan program kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan;
 - b. Kurangnya pengetahuan dan/atau kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas;
 - c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan;
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta perlunya peningkatan penertiban parkir liar;
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan di bidang perhubungan.

2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum;
 - b. Fasilitas pendukung transportasi (seperti terminal dan shelter) memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi;
 - c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) di saat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Proses reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal tersebut dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis kebutuhan ini mencakup evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas, pelayanan transportasi umum, serta pengembangan infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi fokus utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.

Proses perbandingan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta dapat memberikan dampak yang

maksimal bagi peningkatan keselamatan lalu lintas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	72,44%	14.264.398.565	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	72,44%	19.968.215.000	
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	50,00%	13.023.202.976	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	50,00%	17.457.705.000	Pemenuhan target melalui estimasi adanya bantuan/hibah dari Kemenhub dan Kementrian ESDM serta pengadaan marka jalan oleh DPUPR kab. Loteng
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	75 buah	12.802.419.228	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	2125 buah	17.246.905.000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	220.783.748	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 unit	210.800.000	
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	0 %	0,00	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	47,06%	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0	0,00	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	24 buah	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	94,55%	208.955.768	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	94,55%	301.510.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 lap	208.955.768	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	52 lokasi	301.510.000	
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	99,00%	391.382.023	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	99%	809.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 unit	120.970.092	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 unit	400.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 bh	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 bh	175.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	170.411.931	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	209.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	80%	358.374.348	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	80%	500.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 bln	358.374.348	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 bln	500.000.000	
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	80%	131.383.136	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	80%	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 bln	131.383.136	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 bln	200.000.000	
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	14%	151.100.314	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	79%	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 lap	151.100.314	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 lap	500.000.000	
II	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	56.473.569	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	2.000.000.000	
8	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	56.473.569	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	98%	2.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	490 bh		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	490 bh	2.000.000.000	

Dari Tabel di atas terlihat perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dimana rancangan awal RKPD tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Beberapa perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jala Kabupaten/Kota:
 - a) Pagu pada rancangan awal RKPD lebih rendah sekitar Rp 4,4 milyar dari pagu hasil analisis kebutuhan yang semula akan dialokasikan untuk:
 - penggantian seluruh APILL/traffic light di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang telah memiliki masa pakai diatas umur teknis yang dipersyaratkan yaitu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
 - pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - meterisasi penerangan jalan umum (PJU) yang bertujuan untuk menurunkan tagihan listrik; serta
 - pengadaan material pemeliharaan PJU
 - b) Walaupun pagu pada rancangan awal RKPD lebih rendah dari pagu hasil analisis kebutuhan, namun target pada indikator persentase perlengkapan jalan yang terpasang yang direncanakan sebesar 50% optimis dapat tercapai pada tahun 2025 karena adanya hibah penerangan jalan umum dari Kementerian ESDM RI dan pembuatan marka jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah. Namun pagu pada rancangan awal RKPD tidak dapat membiayai rencana kegiatan seperti yang telah disebutkan pada point 1.a di atas.

2. Pada Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, tidak terdapat pagu anggaran pada Rancangan Awal RKPD, sementara di lapangan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 juta yang akan dialokasikan untuk pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana terminal;
3. Pada Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat kekurangan pagu pada rancangan awal RKPD sebesar Rp 400 juta jika dibandingkan dengan pagu hasil analisis kebutuhan, yang semula akan dialokasikan untuk penambahan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor sesuai hasil rekomendasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kementrian Perhubungan dan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah;
4. Pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdapat kekurangan pagu sebesar Rp 350 juta pada rancangan awal RKPD jika dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang rencananya akan dialokasikan untuk operasional bus sekolah;
5. Pada Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota terdapat kebutuhan pagu sebesar Rp 2 milyar untuk pembangunan rambu suar beserta sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan terbangunnya rambu suar ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.

Beberapa catatan penting terkait perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisi kebutuhan di atas tentunya memerlukan penyesuaian dalam Rancangan Akhir RKPD agar dapat mengakomodasi kebutuhan nyata dan mendukung tercapainya tujuan strategis Dinas Perhubungan secara lebih efektif.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan keselamatan lalu lintas, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah akan disampaikan pada Forum Perangkat Daerah yang merupakan wadah bersama antar para *stakeholder* pembangunan untuk membahas kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Adapun data usulan masyarakat pada Musrenbang Kecamatan untuk Tahun 2025 dihimpun pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program: Penyelenggaraan LLAJ Kegiatan/Sub Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Praya	Tersedianya sarpras keselamatan jalan (lampu penerangan jalan umum)	50 unit	Diusulkan pada Musrenbang di Kec Praya. Usulan diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
2	Program: Penyelenggaraan LLAJ Kegiatan: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kec. Praya Tengah	Tersedianya bus sekolah	4 unit	Diusulkan pada Musrenbang di Kec. Praya Tengah. Usulan diteruskan ke Musrenbang Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka usulan-usulan di atas selaras dengan tujuan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Usulan-usulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Usulan dari Kecamatan Praya untuk penyediaan lampu penerangan jalan umum merupakan prioritas kegiatan Dinas Perhubungan dalam menyediakan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas. Namun dengan memperhatikan keterbatasan pagu yang ada serta tidak adanya DAK keselamatan jalan maka usulan ini belum dapat terpenuhi. Dinas Perhubungan hanya dapat melakukan pemeliharaan pada beberapa lampu penerangan jalan yang mengalami kerusakan;
- 2) Usulan dari Kecamatan Praya Tengah untuk penyediaan bus sekolah juga selaras dengan tujuan Dinas Perhubungan, dimana salah satu aspek penting dari peningkatan keselamatan lalu lintas adalah penyediaan dan pengelolaan layanan transportasi umum yang memadai. Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, dan menyediakan layanan transportasi umum yang mencakup berbagai jenis angkutan seperti bus kota, angkutan pedesaan, dan layanan transportasi lainnya. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan memastikan bahwa jaringan transportasi umum mencakup seluruh wilayah, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan beroperasi dengan baik. Ini termasuk melakukan perencanaan rute, penentuan jadwal, serta pengawasan dan evaluasi terhadap layanan yang ada.

Semakin banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, mengurangi minat terhadap angkutan umum. Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas angkutan umum agar lebih menarik bagi masyarakat, termasuk dengan memperbaiki rute, frekuensi, dan kenyamanan layanan angkutan umum, perbaikan terminal dan halte serta fasilitas lainnya.

Selain itu meningkatnya penggunaan layanan transportasi online yang tidak dalam trayek mengancam keberlangsungan angkutan umum konvensional.

Masalah ini bisa diselesaikan dengan melakukan operasi penertiban terhadap angkutan transportasi online yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Ke depan bisa juga dipikirkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi online dengan angkutan umum, serta merumuskan regulasi yang memastikan keseimbangan dan kesetaraan dalam penggunaan jalan antara kedua jenis layanan.

Meskipun sejalan dengan tujuan Dinas Perhubungan, namun dengan memperhatikan keterbatasan pagu dan tidak tersedianya DAK dari Kemendesa PDTT, maka usulan untuk penyediaan bus sekolah belum dapat dipenuhi. Walaupun demikian, Dinas Perhubungan akan berupaya untuk memfasilitasi tersedianya pelayanan bus sekolah dengan menggunakan armada yang dimiliki saat ini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri, dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
6. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

NO	Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya konektivitas	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis 	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka mewujudkan konsep rencana pembangunan daerah pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2024 - 2026 yaitu **"NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali – Nusra yang inklusif dan berkelanjutan"**, Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung konsep rencana pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 2024 - 2026 pada tujuan pertama **“Terwujudnya Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan tujuan ketujuh **“Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Daerah”**.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Terwujudnya lapangan kerja dan produktivitas daerah;
2. Terwujudnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional.

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan darat;
2. Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan laut;
3. Meningkatnya rasio konektivitas daerah;
4. Meningkatnya keselamatan transportasi.

Sedangkan Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB adalah:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung pariwisata dan event internasional MotoGP;
2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum, jalan kaki, dan sepeda;
4. Menyiapkan regulasi daerah di sektor transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah strategis, dan mengantisipasi isu strategis dinas.

5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui upaya meningkatkan manajemen keselamatan jalan, meningkatkan jalan berkeselamatan, meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi keselamatan bagi pengguna jalan, dan meningkatkan koordinasi dengan stakholder terkait terkait penanganan kecelakaan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan darat	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan ketersediaan angkutan umum; - Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang; - Standar infrastruktur transportasi belum optimal; - Tidak tersedianya data dan analisis transportasi yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya lapangan usaha subsektor angkutan laut	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki pelabuhan penyeberangan penumpang dan barang; - Terbatasnya kewenangan pengelolaan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014, yang sebelumnya dari 0-4 mil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan 4-12 mil oleh Pemerintah Provinsi, maka sejak berlakunya UU tersebut maka kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi 0 -12 mil 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana kelautan yang dimiliki; - Belum adanya regulasi pengelolaan perairan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 	Perkembangan KEK Mandalika memberikan potensi yang besar terhadap peningkatan arus wisatawan, baik yang melalui darat, laut, maupun udara

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya rasio konektivitas daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan ketersediaan angkutan umum; - Keterbatasan keterampilan dan pelatihan SDM Sektor Transportasi; - Standar infrastruktur transportasi belum optimal; - Pengelolaan lalu lintas yang belum optimal; - Pengendalian dampak transportasi terhadap lingkungan belum optimal; - Tidak tersedianya data dan analisis transportasi yang akurat untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) - 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyaknya resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

3.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan merupakan implemementasi/penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampe 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visi-nya adalah "mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya" dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeselimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (*merupakan misi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah*)
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Perhubungan dan Visi-Misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu "**meningkatkan keselamatan lalu lintas**" dengan indikator jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2 Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*), dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah **“meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas”** yang diukur dengan VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan).

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2025 diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Jumlah daerah rawan kecelakaan	100	98	96	94
2		Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan)	0,35	0,26	0,25	0,24

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2025 telah mempertimbangkan berbagai faktor penting, termasuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, kontribusi terhadap SDGs, pengentasan kemiskinan, isu-isu strategis, dan tentu saja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah. Penyesuaian dan evaluasi program terhadap faktor-faktor tersebut akan memastikan bahwa rencana kerja tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis dan administratif tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan daerah.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan 2 Program dengan 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan prioritas Urusan Perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 5) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 6) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan:

- 7) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu ditetapkan 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan Penunjang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e) Sub Kegiatan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - h) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Uraian rencana program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan pada Tabel berikut

ini:

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Dishub	BB	5.038.000.000	DAU		BB	5.642.560.000
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang Tercapai	Dishub	100%	111.000.000	DAU		100%	124.320.100
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	6 dok	50.000.000	DAU		6 dok	56.000.000
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dishub	2 dok	5.000.000	DAU		2 dok	5.600.000
1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dishub	2 dok	2.000.000	DAU		2 dok	2.240.000
1.4	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dishub	2 dok	2.000.000	DAU		2 dok	2.240.000
1.5	Sub Kegiatan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dishub	2 dok	2.000.000	DAU		2 dok	2.240.000
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dishub	34 lap	25.000.000	DAU		34 lap	28.000.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	Dishub	1 dok	15.000.000	DAU		1 dok	16.800.000
1.8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah berita acara hasil Forum Perangkat Daerah	Lombok Tengah	2 dok	10.000.000	DAU		2 dok	11.200.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	Lombok Tengah	100%	3.960.000.000	DAU		100%	4.435.200.000
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	560 ob	3.910.000.000	DAU		588 ob	4.379.200.000
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Dishub	12 laporan	50.000.000	DAU		12 laporan	56.000.000
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	Lombok Tengah	100%	17.000.000	DAU		100%	19.040.000
3.1	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lombok Tengah	12 laporan	17.000.000	DAU		12 laporan	19.040.000
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	Dishub	100%	50.000.000	DAU		100%	56.000.000
4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dishub	12 laporan	24.000.000	DAU		12 laporan	26.880.000
4.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar Daerah	3 org	26.000.000	DAU		3 org	29.120.000
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	Lombok Tengah	100%	450.000.000	DAU		100%	504.000.000
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dishub	14 paket	250.000.000	DAU		14 paket	280.000.000
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dishub	12 paket	50.000.000	DAU		12 paket	56.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Daerah	36 laporan	100.000.000	DAU		36 laporan	112.000.000
5.4	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dishub	2 dok	50.000.000	DAU		2 dok	56.000.000
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	Dishub	100%	75.000.000	DAU		100%	84.000.000
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dishub	0 unit	75.000.000	DAU		0 unit	84.000.000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	Dishub	100%	125.000.000	DAU		100%	140.000.000
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dishub	12 laporan	80.000.000	DAU		12 laporan	89.600.000
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dishub	12 laporan	45.000.000	DAU		12 laporan	50.400.000
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	Dishub	100%	250.000.000	DAU		100%	280.000.000
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dishub	46 unit	200.000.000	DAU		46 unit	224.000.000
8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dishub	1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	56.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	Lombok Tengah	72,44%	19.968.215.000	DAU		79,9%	22.963.447.250
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang terpasang	Lombok Tengah	50,00%	17.457.705.000	DAU		75.00%	20.076.360.750
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia	Lombok Tengah	2125 buah	17.246.905	DAU		2500 buah	19.833.941
1.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Lombok Tengah	5 unit	210.800.000	DAU		5 unit	242.420.000
2	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang tergarap	Lombok Tengah	94,55%	301.510.000	DAU		100%	346.736.500
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	12 laporan	301.510.000	DAU		12 laporan	346.736.500
3	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang laik jalan	Lombok Tengah	99,00%	809.000.000	DAU		100%	930.350.000
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Lombok Tengah	11 unit	400.000.000	DAU		11 unit	460.000.000
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lombok Tengah	7000 buah	200.000.000	DAU		7000 buah	230.000.000
3.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Lombok Tengah	9 unit	209.000.000	DAU		9 unit	240.350.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	Lombok Tengah	100%	500.000.000	DAU		100%	575.000.000
4.1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	12 laporan	500.000.000	DAU		12 laporan	575.000.000
5	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	Lombok Tengah	80%	200.000.000	DAU		100%	230.000.000
5.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Lombok Tengah	12 laporan	200.000.000	DAU		12 laporan	230.000.000
6	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	Lombok Tengah	79%	500.000.000	DAU		100%	575.000.000
6.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	12 laporan	500.000.000	DAU		12 laporan	575.000.000
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Lombok Tengah	98%	1.500.000.000	DAU		1.000.000.000	1.725.000.000
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	Lombok Tengah	490 buah	1.500.000.000	DAU		1.000.000.000	1.725.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lombok Tengah	12 laporan	1.500.000.000	DAU		12 laporan	1.725.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025 yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN						19.322.832.040,00							23.186.706.645,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.322.832.040,00							23.186.706.645,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						19.322.832.040,00							23.186.706.645,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Nilai SAKIP OPD	-			B Predikat B Predikat	4.999.843.106,00						-	7.799.516.715,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	-			100 %	97.596.467,00				Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	225.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	49.273.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Senuas Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.152.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Pening katan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	504.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Pening katan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.152.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			0				2 0	504.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				34 Laporan	21.605.400,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	14.165.289,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Berita Acara	9.240.378,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	-			100 %	3.959.755.412,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	4.017.134.319,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				560 Orang/bulan	3.910.698.062,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		3.992.134.319,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	49.057.350,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase validasi data aset OPD	-			100 %	17.044.350,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	17.044.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja lebih dari 80%	-			100 %	48.272.910,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	23.366.700,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	24.906.210,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP</i>	-			100 %	435.641.815,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	395.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				14 Paket	252.121.153,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	52.856.424,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	100.650.000,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				2 Dokumen	30.014.238,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase validasi data aset OPD</i>	-			100 %	75.061.800,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	2.475.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	75.061.800,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		1.875.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	-			100 %	122.857.292,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		200.729.490,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.089.292,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		95.519.490,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	42.768.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		105.210.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	-			100 %	243.613.060,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		336.652.906,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				46 Unit	192.637.060,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		186.652.906,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.976.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<i>Persentase sarpras keselamatan jalan</i>	-			72,44 %	14.266.515.365,00						-	15.237.189.930,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perlengkapan jalan yang terpasang</i>	-			11,17 %	13.023.202.976,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartili m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi Infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat	-	13.564.851.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				75 Unit	12.802.419.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartili m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi Infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat		13.464.971.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

Activate Win
Go to Settings to

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	220.783.748,00	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromart di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat		99.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana dan prasarana Terminal yang tergarap	-			47,06 %	0,00			-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang tergarap	-			94,55 %	211.072.568,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromart di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi Infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat	-	208.338.680,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	211.072.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromart di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi Infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat		208.338.680,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase kendaraan yang laik jalan</i>	-			99 %	391.382.023,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pemilik Kendaraan Wajib Uji	-	564.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>				2 Unit	120.970.092,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batuaji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromanti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pemilik Kendaraan Wajib Uji		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

Activate Window

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				4000 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batuaji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pemilik Kendaraan Wajib Uji		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				10 Unit	170.411.931,00	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batuaji	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pemilik Kendaraan Wajib Uji		139.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen lalu lintas yang dilaksanakan	-			80 %	358.374.348,00			Melanjutka n Pengemb ngan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pengguna Jalan	-	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	358.374.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb ngan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pengguna Jalan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

Activate Window

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam ber lalu lintas</i>	-			78 %	131.383.136,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkuualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkuualitas	Pengguna Jalan	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				12 Laporan	131.383.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkuualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Penin gkatan Tata Kelola Pem erintahan Daerah Optimalisas i infrastruktur dan lingkungan hidup berkuualitas	Pengguna Jalan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasikan	-			79 %	151.100.314,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	151.100.314,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromartim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	-			80 %	56.473.569,00						-	150.000.000,00	

Activate Window

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	56.473.569,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanitem Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pemilik Angkutan Laut dibawah 7GT	-	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	56.473.569,00	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromanitem Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PD-5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas	Pemilik Angkutan Laut dibawah 7GT		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H								19.322.832.040,00					23.186.706.645,00			

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 ini yaitu sebagai berikut:

1. Penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan efektif, mengingat keterbatasan anggaran yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan penerapan skala prioritas kegiatan harus diterapkan dengan bijak;
2. Perlu adanya pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang muncul selama pelaksanaan. Dalam hal ketersediaan anggaran yang kurang memadai, prioritas utama harus diberikan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan utama.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan meliputi:

1. Kepatuhan Terhadap Regulasi:
Seluruh kegiatan harus mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku, termasuk ketentuan anggaran, prosedur administrasi, dan standar kualitas;
2. Koordinasi dan Komunikasi:
Memastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait dan komunikasi yang efektif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan;
3. Pengelolaan Risiko:
Identifikasi dan mitigasi risiko harus dilakukan secara proaktif untuk meminimalisir potensi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan;

4. Evaluasi dan Pelaporan:

Proses evaluasi harus dilakukan secara rutin dan hasilnya dilaporkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk memastikan pelaksanaan yang sukses meliputi langkah-langkah berikut:

1. Penyusunan Rencana Aksi:

Menyusun rencana aksi terperinci untuk setiap kegiatan dengan jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab yang jelas.

2. Monitoring dan Evaluasi:

Mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

3. Pelaporan Berkala:

Menyusun laporan berkala mengenai kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja dan mempresentasikannya kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan umpan balik.

4. Revisi Rencana:

Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan revisi rencana jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan kebutuhan yang berubah.

Dengan mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan dan melaksanakan rencana tindak lanjut secara efektif, diharapkan Rencana Kerja ini dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan perencanaan awal.

Demikian Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.



Prova, 31 Juli 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah

DRS. H. LALU HERDAN, M.Si
NIP. 19690815 199803 1 007
Pembina Utama Muda (IV/c)

LAMPIRAN